



Adaptasi Terhadap Konteks Nasional: Strategi LDII Indonesia dan Ikhwanul Muslimin Mesir dalam Menjalin Hubungan Agama-Negara

Hilmi Muhammadiyah

Sejarah Peradaban Islam

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

muhammadiyahhilmmy@gmail.com

Mukodas Arif Subekti

Sekolah Pascasarjana

Universitas Negeri Jakarta

mukodas_9911922014@mhs.unj.ac.id

Received: 26.06.2025

Accepted: 03.12.2025

Published: 05.12.2025

Abstract: This article examines the dynamic interactions between religious movements and state authorities by comparing two distinct Islamic organizations: Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) in Indonesia and the Muslim Brotherhood (Ikhwanul Muslimin, IM) in Egypt. Both organizations, rooted in Islamic principles, have forged complex relationships with their respective states, yet their paths reflect divergent approaches shaped by unique national contexts. LDII, operating within Indonesia's pluralistic democracy underpinned by Pancasila, has strategically adapted to national norms. Despite past controversies, LDII has embraced a pragmatic approach, emphasizing Quran and Hadith-based teachings, actively participating in socio-economic initiatives, formalizing its organizational structure, and collaborating with government programs. This demonstrates a flexible alignment with Indonesia's emphasis on national unity and religious moderation. In stark contrast, Egypt's Muslim Brotherhood, once a dominant political force, faced an existential threat following the 2013 military coup. Forced into exile, the IM has largely maintained an ideologically rigid stance in opposition to the state. By analyzing these two cases, this study highlights how contextual factors ranging from political systems and state ideologies to historical trajectories and internal organizational dynamics profoundly influence the strategies religious movements employ to survive and thrive within state-religion frameworks.

Keywords: Religious Movements, State Religion Relations, LDII, Ikhwanul Muslimin, Political Islam

Abstract: Artikel ini mengkaji interaksi dinamis antara gerakan keagamaan dan otoritas negara dengan membandingkan dua organisasi Islam yang berbeda: Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Indonesia dan Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir. Kedua organisasi, yang berakar pada prinsip-prinsip Islam, telah membentuk hubungan yang kompleks dengan negara masing-masing, namun jalur yang mereka tempuh mencerminkan pendekatan yang berbeda yang dibentuk oleh konteks nasional yang unik. LDII, yang beroperasi dalam demokrasi pluralistik Indonesia yang didasari Pancasila, telah beradaptasi secara strategis dengan norma-norma

nasional. Meskipun pernah menuai kontroversi, LDII telah menganut pendekatan pragmatis, menekankan ajaran berbasis Al-Quran dan Hadits, berpartisipasi aktif dalam inisiatif sosial-ekonomi, memformalkan struktur organisasinya, dan berkolaborasi dengan program pemerintah. Hal ini menunjukkan keselarasan yang fleksibel dengan penekanan Indonesia pada persatuan nasional dan moderasi beragama. Sebaliknya, Ikhwanul Muslimin Mesir, yang pernah menjadi kekuatan politik dominan, menghadapi ancaman eksistensial setelah kudeta militer 2013. Terpaksa berada di pengasingan, IM sebagian besar mempertahankan sikap ideologis yang kaku dalam oposisi terhadap negara. Dengan menganalisis kedua kasus ini, penelitian ini menyoroti bagaimana faktor-faktor kontekstual mulai dari sistem politik dan ideologi negara hingga lintasan sejarah dan dinamika internal organisasi sangat memengaruhi strategi yang digunakan gerakan keagamaan untuk bertahan hidup dan berkembang dalam kerangka hubungan agama-negara.

Kata Kunci: Gerakan Keagamaan, Hubungan Negara Agama, LDII, Ikhwanul Muslimin, Politik Islam

1. Pendahuluan

Dalam interaksi dinamis antara gerakan keagamaan dan otoritas negara, organisasi Islam sering dihadapkan pada kebutuhan untuk beradaptasi agar dapat bertahan dan berkembang dalam lanskap politik yang terus berubah. Artikel ini mengkaji dua kasus berbeda: Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Indonesia dan Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir. Kedua organisasi yang berakar pada prinsip-prinsip Islam ini telah menjalin hubungan kompleks dengan negara masing-masing, namun jalan yang mereka tempuh mencerminkan pendekatan berbeda yang dibentuk oleh konteks nasional yang unik.

LDII, yang didirikan pada 1972, beroperasi dalam demokrasi pluralistik Indonesia dengan Pancasila sebagai landasan ideologis. Meski sempat dilabeli sebagai aliran "sesat" oleh sebagian kalangan, LDII secara strategis menyesuaikan diri dengan norma-norma negara, menekankan ajaran berbasis Al-Quran dan Hadis sambil aktif dalam kegiatan sosial-ekonomi dan memformalkan struktur organisasinya sesuai peraturan nasional. Penerimaannya terhadap Pancasila dan kolaborasi dengan program pemerintah menunjukkan adaptasi pragmatis terhadap penekanan Indonesia pada persatuan dan moderasi beragama.

Sebaliknya, Ikhwanul Muslimin Mesir yang pernah menjadi kekuatan politik dominan, menghadapi ancaman eksistensial setelah kudeta militer 2013. Terpaksa berada di pengasingan, IM bergulat dengan perpecahan internal, perubahan strategi bertahan - dari perlawanan damai hingga perdebatan tentang kekerasan - serta tekanan politik regional dan internasional yang bermusuhan. Berbeda dengan integrasi LDII dalam kerangka negara, perjalanan IM menyoroti tantangan mempertahankan kohesi di bawah tekanan represif, yang berujung pada atrofi organisasi dan fokus ulang pada identitas keagamaan yang tertutup.

Analisis komparatif ini mengeksplorasi bagaimana kedua organisasi merumuskan misi keagamaan mereka dalam lingkungan politik yang kontras. Bagi LDII, adaptasi berarti menyelaraskan ajaran Islam dengan semangat pluralisme Indonesia, sementara strategi IM yang didorong oleh pengasingan mengungkap ketegangan antara kekakuan ideologis dengan kebutuhan pragmatis untuk bertahan hidup. Dengan meneliti pembingkaian otoritas keagamaan, keterlibatan dengan struktur negara, dan respons terhadap tekanan eksternal, penelitian ini memberikan kontribusi pada diskusi lebih luas tentang ketahanan gerakan Islam dan peran mereka yang terus berkembang dalam membentuk hubungan agama-negara.

Artikel ini berargumen bahwa meski kedua kelompok menekankan kemurnian doktrin, kemampuan adaptasi mereka atau ketiadaannya sangat bergantung pada dinamika politik nasional, keputusan kepemimpinan, dan jaringan transnasional. Pada akhirnya, kisah mereka mengungkap keseimbangan rumit yang harus dijaga oleh gerakan Islam antara kesetiaan ideologis dan pragmatisme strategis dalam menghadapi negara modern.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif dengan studi kasus pada LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) dan Ikhwanul Muslimin di Mesir untuk menganalisis strategi adaptasi mereka dalam relasi agama-negara. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan 15 informan (pemimpin, anggota, dan pengamat dari kedua organisasi), analisis dokumen (kebijakan pemerintah, fatwa keagamaan, dan arsip organisasi), serta studi literatur terkait gerakan Islam dan politik¹. Pendekatan komparatif dipilih untuk mengidentifikasi pola berbeda dalam respons kedua organisasi terhadap tekanan politik, dengan mempertimbangkan konteks Indonesia yang pluralis dan Mesir yang otoriter.²

Analisis data menggunakan metode tematik³ untuk mengkodekan strategi adaptasi ke dalam tiga kategori: kolaborasi, resistensi, dan moderasi. Teori "Political Opportunity Structure"⁴ diterapkan untuk menjelaskan bagaimana LDII memanfaatkan ruang demokrasi Indonesia, sementara Ikhwanul Muslimin menghadapi represi negara Mesir pasca-2013⁵. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen resmi, dan laporan media untuk

¹ Carrie Rosefsky Wickham, 'The Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamist Movement-Updated Edition', 2015.

² Yon Machmudi, *Islamising Indonesian: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)* (ANU Press, 2008).

³ Virginia Braun and Victoria Clarke, 'Using Thematic Analysis in Psychology', *Qualitative Research in Psychology*, 3.2 (2006), 77-101.

⁴ Doug McAdam, Sidney Tarrow, and Charles Tilly, 'Dynamics of Contention Cambridge, UK: Cambridge Univ' (Press, 2001).

⁵ Mariz Tadros, *The Muslim Brotherhood in Contemporary Egypt: Democracy Redefined or Confined?* (Routledge, 2012).

memastikan validitas temuan. Penelitian ini juga mengadopsi analisis wacana kritis⁶ untuk mengeksplorasi narasi keagamaan yang digunakan kedua kelompok dalam legitimasi politik.

Keterbatasan penelitian mencakup kesenjangan temporal akibat dinamika politik Mesir yang berubah pasca-Arab Spring, serta bias informan dari anggota organisasi yang mungkin menyensor respons. Untuk mengurangi bias, peneliti melibatkan *peer review* dengan akademisi studi Islam dan melakukan refleksivitas posisional. Studi ini berkontribusi pada literatur gerakan Islam dengan menunjukkan bagaimana konteks nasional membentuk strategi organisasi keagamaan, sekaligus memperkaya diskusi tentang relasi agama-negara di dunia Muslim.⁷

3. Hasil dan Pembahasan

A. Konteks Sejarah dan Politik: Evolusi LDII dari Era Orde Baru ke Reformasi

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), yang didirikan pada 1972 sebagai kelanjutan dari gerakan Islam sebelumnya, Darul Hadith, telah beradaptasi dengan lanskap politik Indonesia yang berubah melalui penyesuaian strategis terhadap kebijakan negara. Pada masa rezim Orde Baru (1966–1998), LDII dicurigai karena kecenderungan Salafi puritannya dan struktur organisasinya yang tertutup, yang dianggap pemerintah otoriter sebagai ancaman potensial bagi persatuan nasional⁸. Namun, berbeda dengan kelompok Islamis garis keras yang ditekan, LDII menghindari konfrontasi langsung dengan menekankan pendidikan agama (tarbiyah) dan kesetiaan pada Pancasila, ideologi negara Indonesia⁹. Kebijakan Orde Baru yang mendepolitisasi Islam memaksa LDII menjauhkan diri dari aktivisme politik, dan sebagai gantinya fokus pada reformasi moral (akhlik) dan penghafalan Al-Quran sebuah strategi pragmatis untuk bertahan di bawah pengawasan negara.

Era Reformasi pasca-1998 membawa desentralisasi demokratis, memberikan LDII kebebasan lebih besar untuk memperluas jaringan dakwah dan pendidikannya. Namun, kelompok ini tetap menghindari politik partisan, membedakan dirinya dari partai-partai Islamis seperti PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang muncul pada periode yang sama¹⁰. Kesetiaan LDII pada Pancasila menjadi alat utama untuk memperoleh legitimasi, karena mereka menyajikan ajaran-ajarannya sebagai sesuatu yang selaras dengan semangat pluralisme Indonesia. Misalnya, para pemimpin LDII secara terbuka mendukung program-program pemerintah seperti moderasi beragama (wasatiyyah Islam) dan dialog antaragama, sejalan dengan upaya negara untuk

⁶ Norman Fairclough, *Media Discourse* (Edward Arnold London, 1995).

⁷ Robert W Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton University Press, 2011).

⁸ Mohammad Nor Ichwan, ‘Official Reform of Islam: State Islam and the Ministry of Religious Affairs in Contemporary Indonesia, 1966-2004’, 2006.

⁹ Machmudi.

¹⁰ Hefner.

melawan radikalisme¹¹. Adaptasi ini mencerminkan isomorfisme institusional¹², di mana LDII meniru wacana yang disukai negara untuk mengamankan posisinya di Indonesia yang sedang mengalami demokratisasi.

Kerangka Pancasila telah menjadi baik hambatan maupun peluang bagi LDII. Di satu sisi, Pancasila membatasi kemampuan LDII untuk mengadvokasi penerapan syariah secara formal tidak seperti gerakan yang lebih terpolitisasi seperti FPI (Front Pembela Islam). Di sisi lain, penekanan Pancasila pada harmoni beragama memungkinkan LDII mendapatkan dukungan negara, terutama di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, yang memandang kelompok Islam moderat sebagai sekutu dalam melawan ekstremisme¹³. Pendekatan non-konfrontatif LDII – yang memprioritaskan layanan sosial (seperti sekolah, klinik) daripada tuntutan politik – menjadi contoh bagaimana gerakan keagamaan dapat berkembang dalam Struktur Peluang Politik (Political Opportunity Structure/POS) Indonesia yang inklusif¹⁴. Secara historis, strategi ini melindungi LDII dari represi sekaligus memungkinkannya tumbuh menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, dengan anggota diperkirakan mencapai 3 juta orang¹⁵.

B. Konteks Sejarah dan Politik Ikhwanul Muslimin di Mesir: Era Kolonial Hingga Pasca Revolusi 2011

Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Muslim), yang didirikan pada 1928 oleh Hassan al-Banna, muncul sebagai respons terhadap pemerintahan kolonial Inggris dan kebijakan sekularisasi monarki Mesir. Awalnya berfokus pada dakwah (penyebaran Islam) dan layanan sosial, gerakan ini secara bertahap berkembang menjadi gerakan Islamis paling berpengaruh di Mesir yang memperjuangkan negara Islam melalui reformasi bertahap¹⁶. Pada era Gamal Abdel Nasser (1954-1970), kelompok ini menghadapi represi berat setelah dituduh melakukan percobaan pembunuhan terhadap presiden pada 1954. Ribuan anggotanya dipenjara, dan

¹¹ Irfan Fahmi, Bagus Takwin, and Roby Muhamad, 'Nilai Moral Sebagai Prediktor Orientasi Politik Pada Anggota Organisasi Keagamaan', *Psypathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6.2 (2019), 165–80.

¹² Paul J DiMaggio and Walter W Powell, 'The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields', *American Sociological Review*, 48.2 (1983), 147–60.

¹³ Robin Bush, '13 Religious Politics and Minority Rights during the Yudhoyono Presidency', *The Yudhoyono Presidency Indonesia's Decade of Stability and Stagnation*, 2015, 239–57.

¹⁴ McAdam, Tarrow, and Tilly.

¹⁵ Rijalud Da'wah and Totok Wahyu Abadi, 'Privacy Management And Social Identity Of The Indonesian Islamic Dakwah Institution (LDII) Contribution In Interacting Communications With The Surrounding Communities', *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 7 (2022), 10–21070.

¹⁶ MOHALIHS ZUHRI, 'ANALISIS PELANGGARAN HUMAN SECURITY PEMERINTAH MESIR TERHADAP IKHWANUL MUSLIMIN PERIODE GAMAL ABDUL NASER & ANWARSADAT (1954-1981)', *UII*, 2024.

Ikhwanul Muslimin secara resmi dilarang, memaksanya bergerak di bawah tanah dengan struktur sel rahasia dan jaringan kesejahteraan¹⁷.

Di bawah Anwar Sadat (1970-1981), Ikhwanul Muslimin mengalami pendekatan taktis ketika rezim membutuhkan dukungan Islamis untuk melawan lawan-lawan politik sayap kiri. Kelompok ini diizinkan berpartisipasi terbatas dalam politik melalui aliansi dengan partai-partai legal sambil memperluas pengaruhnya di serikat profesi dan universitas¹⁸. Namun, toleransi rapuh ini berakhir di era Hosni Mubarak (1981-2011), yang bergantian membuka ruang politik terbatas (misalnya memenangkan 20% kursi parlemen pada 2005) dan melakukan tindakan keras, terutama setelah kesuksesan elektoral Ikhwan mengancam stabilitas rezim¹⁹. Era Mubarak memaksa Ikhwanul Muslimin masuk dalam siklus aktivisme semi-legal berpartisipasi dalam pemilu sambil mempertahankan lembaga-lembaga Islam paralel (masjid, amal, sekolah) sebagai jalur hidup organisasi²⁰.

Musim Semi Arab 2011 sempat mengubah nasib Ikhwanul Muslimin, dengan sayap politiknya (Partai Kebebasan dan Keadilan) memenangkan pemilu dan Mohamed Morsi menjadi presiden terpilih secara demokratis pertama Mesir (2012-2013). Namun, pemerintahan Morsi yang penuh gejolak ditandai krisis konstitusional dan tata kelola yang buruk berujung pada kudeta militer oleh Abdel Fattah el-Sisi pada 2013. Represi berikutnya belum pernah terjadi sebelumnya: ribuan anggota dibunuh atau dipenjara, kelompok ini ditetapkan sebagai organisasi teroris, dan aset-asetnya disita²¹. Di bawah kebangkitan otoriter Sisi, Ikhwanul Muslimin terpaksa mengungsi atau melakukan perlawanan bawah tanah, terpecah menjadi faksi-faksi yang memperdebatkan oposisi bersenjata versus damai²². Lintasan sejarah ini menggambarkan bagaimana strategi Ikhwanul Muslimin dari aktivisme sosial hingga keterlibatan politik pada dasarnya dibentuk oleh struktur kesempatan politik Mesir yang berubah-ubah²³.

¹⁷ Nuriana Khoiriyah, ‘Konsep Khilafah Islamiyyah Gerakan Ikhwanul Muslimin Menurut Pemikiran Hasan Al-Banna (1949-1970M)’, 2016.

¹⁸ Shamsul Azhar Yahya, ‘Politik Dan Dakwah Dalam Perjuangan Ikhwan Al Muslimin Di Mesir, 1970-1981’ (University of Malaya (Malaysia), 2017).

¹⁹ Ahmad Mawlana and Fadi Zatari, ‘The Role of Central Security Forces in Supporting Authoritarian Regimes in Egypt (1969-2011)’, *Insight Turkey*, 27.1 (2025), 217-34.

²⁰ Diva Nadia Lestari, Nidaurohmah Nidaurohmah, and Isna Nur Septiana, ‘SEJARAH DAN PERKEMBANGAN IKHWANUL MUSLIMIN DI MESIR’, *JUTEQ: JURNAL TEOLOGI & TAFSIR*, 2.4 (2025), 833-51.

²¹ Hrustan Šišić, ‘A Strategic Partnership between the USA and Egypt: A Historical Overview’, *MAP Social Sciences*, 5 (2025), 55-67.

²² Maze E N Bahá, *Brotherhood of Shadows: The Rise, Fall, and Global Threat of the Muslim Brotherhood* (The Good Muslim, 2025).

²³ Abdul Chalik and Zaky Ismail, ‘Menolak Mati: Jejak Ideologi Ormas Dan Partai Islam’ (Pustaka Aksara, 2025).

C. Analisis Komparatif: LDII dan Ikhwanul Muslimin

1. Pendekatan yang berbeda dalam hubungan dengan negara

Salah satu perbedaan paling mencolok antara Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Ikhwanul Muslimin (Ikhwanul Muslimin di Mesir) terletak pada fundamental pendekatan mereka dalam berhubungan dengan negara. Meskipun kedua organisasi ini beroperasi di negara-negara dengan mayoritas Muslim, strategi yang mereka adopsi mencerminkan pertimbangan ideologis yang mendalam serta pragmatisme yang disesuaikan dengan konteks politik masing-masing. Perbedaan mendasar ini tidak hanya membentuk identitas organisasi mereka tetapi juga menentukan nasib dan lintasan keberadaan mereka dalam tatanan sosial dan politik.

LDII: Sikap Apolitik dan Menghindari Konflik

LDII secara konsisten mempertahankan posisi yang apolitik, dengan tegas memisahkan diri dari keterlibatan langsung dalam arena politik praktis. Fokus utama LDII adalah pada penguatan pendidikan agama, pembangunan moralitas individu dan komunitas, serta penyediaan layanan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat²⁴. Pendekatan ini sangat selaras dengan ideologi Pancasila Indonesia yang mempromosikan harmoni antaragama di bawah kerangka negara pluralistik. Dengan menjaga jarak dari aktivisme politik yang seringkali memicu konflik, LDII berhasil memperoleh legitimasi dari pemerintah dan masyarakat luas, sekaligus secara efektif menghindari konfrontasi yang dapat merugikan organisasi²⁵. Strategi ini telah memungkinkan LDII untuk berkembang dan berdakwah dengan relatif aman di tengah dinamika politik Indonesia yang beragam.

Ikhwanul Muslimin: Keterlibatan Politik dan Konfrontasi dengan Rezim Otoriter

Sebaliknya, Ikhwanul Muslimin memiliki sejarah panjang keterlibatan yang sangat dalam dalam politik. Organisasi ini secara aktif berupaya memengaruhi pemerintahan melalui berbagai saluran, termasuk partisipasi dalam pemilihan umum, penyelenggaraan demonstrasi dan protes, dan pada beberapa kesempatan, bahkan terlibat dalam konfrontasi langsung dengan rezim yang berkuasa²⁶. Pendekatan politik yang agresif ini seringkali menyebabkan ketegangan berulang dengan rezim otoriter Mesir, yang pada gilirannya mengakibatkan siklus represi, penangkapan massal, dan marginalisasi yang berkelanjutan terhadap Ikhwanul

²⁴ ABDUROHMAN BIMA, ‘KONSEP MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF LDII VERSI LAMA DAN VERSI BARU (Studi Di Kota Bandar Lampung)’ (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

²⁵ Azyumardi Azra, *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation* (Mizan Pustaka, 2006).

²⁶ Wickham.

Muslimin²⁷. Keinginan kuat Ikhwanul Muslimin untuk menerapkan sistem pemerintahan Islamis dan ambisi politik mereka telah menjadikannya target utama penindasan negara, terutama setelah kudeta militer pada tahun 2013 yang menggulingkan Presiden Mohamed Morsi, seorang tokoh yang didukung oleh Ikhwanul Muslimin.

Perbandingan Utama: Strategi dan Konsekuensi

Perbedaan fundamental dalam pendekatan politik antara LDII dan Ikhwanul Muslimin dapat diringkas dalam tabel berikut, yang menyoroti aspek-aspek kunci dari strategi dan hubungan mereka dengan negara.

Tabel 1. Strategi dan Konsekuensi Politik LDII dan Ikhwanul Muslimin

Aspek	LDII (Indonesia)	Ikhwanul Muslimin (Mesir)
Sikap Politik	Apolitik, secara aktif menghindari konflik dengan negara	Sangat terlibat politik, berkonfrontasi langsung dengan rezim
Hubungan dengan Negara	Kooperatif, mencari pengakuan dan legitimasi negara	Bermusuhan, seringkali menghadapi represi dan penindasan negara
Strategi Utama	Dakwah agama, pendidikan, dan layanan sosial kemasyarakatan	Islam politik, reformasi pemerintahan, dan perubahan struktural

Perbedaan mendalam ini muncul dari konteks politik nasional yang sangat berbeda di kedua negara. Pluralisme demokratis di Indonesia telah memberikan ruang bagi LDII untuk beroperasi dan berkembang tanpa permusuhan langsung dari negara, bahkan cenderung mendapatkan pengakuan resmi²⁸. Sementara itu, otoritarianisme yang mendominasi lanskap politik Mesir telah memaksa Ikhwanul Muslimin masuk ke dalam siklus perlawanan dan penindasan yang tak berkesudahan, seringkali berakhir dengan pelarangan dan penangkapan anggotanya²⁹.

2. Kontras Tajam dengan Akomodasi Ikhwanul Muslimin dan LDII

Perjalanan Ikhwanul Muslimin (IM) menunjukkan divergensi fundamental dengan strategi LDII di Indonesia. Sementara LDII konsisten menghindari konfrontasi politik dan memosisikan diri sebagai "mitra pembangunan", IM

²⁷ Khalil Al-Anani, *Inside the Muslim Brotherhood: Religion, Identity, and Politics* (Oxford University Press, 2016).

²⁸ Aris Kristianto, 'Pluralisme Agama Di Indonesia', *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya*, 2018.

²⁹ Ahmad Rizky M Umar, *Dakwah Dan Kuasa* (Basabasi, 2020).

melakukan over-reach kekuasaan pada 2012-2013 dengan konfrontasi terbuka terhadap deep state Mesir. Struktur organisasi IM yang hierarkis-terpusat di bawah Mursyid Am rentan terhadap decapitation strike, berbeda dengan desentralisasi teritorial LDII yang lebih tahan tekanan. Faktor kunci lain adalah perbedaan konteks negara: mesin militer Mesir yang anti-Islamis berhadapan dengan tata kelola inklusif Indonesia berbasis Pancasila³⁰. Kegagalan IM mengonsolidasikan kekuasaan berbeda dengan kesuksesan LDII memperluas pengaruh secara diam-diam menegaskan teori Mc Adam tentang pentingnya *political opportunity structure* bagi kelangsungan gerakan keagamaan. Transformasi strategis Ikhwanul Muslimin (IM) merepresentasikan laboratorium gerakan Islam transnasional dalam merespons dinamika politik Mesir.

Tabel 2. Komparatif IM dan LDII berdasarkan Faktor Struktural

Faktor	Ikhwanul Muslimin (Mesir)	LDII (Indonesia)
Strategi Politik	Over-ambisi kuasa (2012-2013)	Depolitisasi konsisten
Relasi Negara	Konfrontasi (dekrit vs. militer)	Simbiosis (mitra pembangunan)
Struktur Organisasi	Hierarkis-terpusat (Mursyid Am)	Desentralisasi-teritorial
Konteks Negara	Deep State anti-Islamis	Tata kelola inklusif Pancasila

3. Ikhwanul Muslimin: Represi, Pembubaran, dan Fragmentasi

Berbeda secara drastis dengan LDII yang menikmati penerimaan dan stabilitas di Indonesia, keterlibatan politik yang intens oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir justru berujung pada siklus represi yang brutal, pelarangan organisasi, dan perpecahan internal yang parah. Hubungan yang konfrontatif dengan rezim otoriter Mesir telah menghantam Ikhwanul Muslimin dengan dampak yang sangat merusak. Organisasi ini telah mengalami konsekuensi pahit dari strategi politik mereka.

Perpecahan Internal yang Mendalam: Penindasan yang terus-menerus dan tanpa henti oleh negara memicu krisis eksistensial dalam tubuh Ikhwanul Muslimin, yang pada gilirannya menyebabkan perpecahan ideologis dan strategis yang mendalam. Sebagian faksi, yang merasa putus asa dengan jalan politik damai, mulai mengadvokasi penggunaan kekerasan sebagai satu-satunya cara untuk melawan rezim. Di sisi lain, faksi-faksi lain, yang merasa bahwa kekerasan hanya akan memperburuk situasi dan mengundang lebih banyak represi, mencari jalan rekonsiliasi atau setidaknya strategi yang lebih pragmatis untuk bertahan hidup

³⁰ Hefner.

dalam pengasingan³¹. Perpecahan ini telah melemahkan kohesi organisasi dan memperumit upaya untuk bangkit kembali.

Berbeda dengan LDII yang mampu berkembang dan mendapatkan legitimasi di bawah toleransi negara Indonesia yang pluralistik, keberpihakan Ikhwanul Muslimin pada Islam politik dan ambisinya untuk meraih kekuasaan justru menjadikannya target utama penindasan negara. Siklus konfrontasi dan represi ini secara signifikan telah melemahkan pengaruh Ikhwanul Muslimin, memaksa mereka untuk beroperasi dalam bayang-bayang atau di pengasingan, jauh dari panggung politik yang pernah mereka dominasi.

Adapun perbandingan hasil akhir dari pendekatan yang berbeda antara LDII dan Ikhwanul Muslimin memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak dari strategi hubungan dengan negara, sebagai berikut:

Tabel 3. Analisis Komparatif Hasil Akhir

Hasil	LDII (Indonesia)	Ikhwanul Muslimin (Mesir)
Hubungan dengan Negara	Diterima secara luas, diakui secara hukum, dan dihormati sebagai organisasi keagamaan.	Dilarang, dicap sebagai organisasi teroris, dan menjadi target utama penindasan.
Stabilitas Organisasi	Sangat tinggi, mampu berkembang bebas, memperluas jaringan, dan menjalankan program tanpa hambatan berarti.	Sangat rendah, terus-menerus ditekan, dilemahkan, dan mengalami perpecahan internal yang parah.
Keberlanjutan Jangka Panjang	Menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan, dengan prospek yang cerah untuk terus beroperasi dan berkontribusi.	Terpaksa bertahan dalam pengasingan atau secara klandestin, menghadapi tantangan besar untuk keberlanjutan dan relevansi.

D. Analisis Komparatif: Demokrasi vs. Otoritarianisme dalam Strategi Organisasi Keagamaan

Pengalaman yang sangat kontras antara Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir memberikan wawasan yang mendalam dan krusial mengenai bagaimana sistem politik suatu negara secara fundamental membentuk strategi, adaptasi, dan nasib akhir dari organisasi keagamaan. Kedua gerakan Islam ini, meskipun memiliki akar spiritual dan tujuan untuk memperkuat

³¹ Ezgi Basaran, *The New Spirit of Islamism: Interactions Between the AKP, Ennahda and the Muslim Brotherhood* (Bloomsbury Publishing, 2024).

ajaran agama, telah menempuh jalur yang sangat berbeda, yang secara langsung mencerminkan lanskap politik di mana mereka beroperasi.

Di satu sisi, dalam iklim demokrasi pluralistik Indonesia, LDII telah menunjukkan kapasitas luar biasa untuk berkembang melalui strategi adaptasi yang cerdas dan kerja sama yang konstruktif dengan negara. Dengan memprioritaskan pendidikan agama, pembangunan moral, dan layanan sosial sambil secara sengaja menghindari keterlibatan politik langsung, LDII berhasil mendapatkan legitimasi dan ruang gerak yang luas dari pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan mereka dalam mengintegrasikan diri ke dalam kerangka Pancasila, yang menekankan harmoni dan toleransi antarumat beragama, telah memungkinkan LDII untuk mendirikan jaringan luas masjid, sekolah, dan lembaga amal tanpa menghadapi represi. Mereka menjadi contoh nyata bagaimana sebuah gerakan keagamaan dapat tumbuh subur dalam lingkungan demokrasi yang akomodatif, bahkan menjadi bagian integral dari jaring pengaman sosial dan moral negara.

Sebaliknya, Ikhwanul Muslimin di lingkungan otoriter Mesir telah menghadapi marginalisasi yang terus-menerus dan penindasan yang brutal. Sejak didirikan, Ikhwanul Muslimin secara inheren memiliki dimensi politik yang kuat, berusaha untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dalam struktur negara dan masyarakat. Ambisi politik ini, meskipun sah dalam perspektif mereka, secara konsisten dianggap sebagai ancaman eksistensial oleh rezim militer Mesir yang sekuler. Akibatnya, setiap upaya Ikhwanul Muslimin untuk berpartisipasi dalam politik secara terbuka, bahkan ketika berhasil meraih kemenangan dalam pemilu, selalu berujung pada siklus penangkapan massal, pelarangan, dan kekerasan negara. Ini menunjukkan bagaimana rezim otoriter tidak memberikan ruang bagi kekuatan politik independen, terutama yang berpotensi menantang hegemoni mereka, memaksa Ikhwanul Muslimin untuk beroperasi di bawah tanah atau dalam pengasingan, terus-menerus berjuang untuk keberlangsungan hidup.

Perbandingan mendalam antara LDII dan Ikhwanul Muslimin ini secara tegas menegaskan peran kritis konteks politik dalam menentukan apakah sebuah gerakan keagamaan akan berhasil mengintegrasikan diri dengan negara sebagai mitra yang diakui, atau justru terpaksa menjadi kekuatan oposisi yang dimarginalkan dan ditekan. Kisah mereka adalah pelajaran berharga tentang bagaimana lingkungan politik baik itu sistem demokrasi yang permisif atau rezim otoriter yang represif – memainkan peran dominan dalam membentuk pilihan strategis organisasi keagamaan, serta konsekuensi jangka panjang dari pilihan-pilihan tersebut terhadap kelangsungan hidup dan pengaruh mereka dalam masyarakat.

4. Kesimpulan

Studi komparatif ini menunjukkan bahwa konteks politik nasional merupakan faktor paling menentukan dalam membentuk strategi, perkembangan, dan nasib organisasi keagamaan seperti LDII di Indonesia dan Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Dalam sistem politik demokratis dan pluralistik, LDII mampu berkembang melalui pendekatan akomodatif, selaras dengan Pancasila, serta fokus pada pendidikan akar rumput dan layanan sosial sehingga memperoleh legitimasi publik. Sebaliknya, Ikhwanul Muslimin beroperasi di lingkungan otoriter yang represif, sehingga setiap upaya partisipasi politik berujung pada penindasan negara, memicu fragmentasi internal, dan memaksa organisasi ini mengadopsi strategi bertahan hidup seperti operasi bawah tanah dan aktivitas di pengasingan. Perbedaan mencolok ini menegaskan bahwa ideologi serupa dapat menghasilkan karakter dan strategi yang sangat berbeda ketika berhadapan dengan struktur politik yang tidak sama.

Temuan penelitian ini juga membuka peluang studi lanjutan, seperti memperluas perbandingan ke organisasi Islam di negara mayoritas Muslim lainnya dan menganalisis bagaimana perubahan generasi kepemimpinan atau media digital membentuk adaptasi gerakan Islam dalam konteks demokrasi maupun otoriter. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa dinamika gerakan Islam tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik tempat mereka beroperasi. Organisasi keagamaan dapat berkembang melalui integrasi dalam sistem demokratis atau justru terjebak dalam siklus represi di bawah rezim otoriter. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut mengenai hubungan agama-negara tetap penting untuk memperkaya pemahaman teoretis tentang bagaimana gerakan keagamaan merespons dan menegosiasikan kekuasaan politik dalam dunia Muslim kontemporer.

Daftar Pustaka

- Al-Anani, Khalil, *Inside the Muslim Brotherhood: Religion, Identity, and Politics* (Oxford University Press, 2016)
- Azra, Azyumardi, *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation* (Mizan Pustaka, 2006)
- Baha, Maze E N, *Brotherhood of Shadows: The Rise, Fall, and Global Threat of the Muslim Brotherhood* (The Good Muslim, 2025)
- Basaran, Ezgi, *The New Spirit of Islamism: Interactions Between the AKP, Ennahda and the Muslim Brotherhood* (Bloomsbury Publishing, 2024)
- BIMA, ABDUROHMAN, 'KONSEP MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF LDII VERSI LAMA DAN VERSI BARU (Studi Di Kota Bandar Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2024)
- Braun, Virginia, and Victoria Clarke, 'Using Thematic Analysis in Psychology', *Qualitative Research in Psychology*, 3.2 (2006), 77–101
- Bush, Robin, '13 Religious Politics and Minority Rights during the Yudhoyono Presidency', *The Yudhoyono Presidency Indonesia's Decade of Stability and Stagnation*, 2015, 239–57
- Chalik, Abdul, and Zaky Ismail, 'Menolak Mati: Jejak Ideologi Ormas Dan Partai Islam' (Pustaka Aksara, 2025)

- Hilmi Muhammadiyah & Mukodas Arif Subekti
- Da'wah, Rijalud, and Totok Wahyu Abadi, 'Privacy Management And Social Identity Of The Indonesian Islamic Dakwah Institution (LDII) Contribution In Interacting Communications With The Surrounding Communities', *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 7 (2022), 10–21070
- DiMaggio, Paul J, and Walter W Powell, 'The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields', *American Sociological Review*, 48.2 (1983), 147–60
- Fahmi, Irfan, Bagus Takwin, and Roby Muhamad, 'Nilai Moral Sebagai Prediktor Orientasi Politik Pada Anggota Organisasi Keagamaan', *Psypathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6.2 (2019), 165–80
- Fairclough, Norman, *Media Discourse* (Edward Arnold London, 1995)
- Hefner, Robert W, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton University Press, 2011)
- Ichwan, Mohammad Nor, 'Official Reform of Islam: State Islam and the Ministry of Religious Affairs in Contemporary Indonesia, 1966-2004', 2006
- Khoiriyyah, Nuriana, 'Konsep Khilafah Islamiyyah Gerakan Ikhwanul Muslimin Menurut Pemikiran Hasan Al-Banna (1949-1970M)', 2016
- Kristianto, Aris, 'Pluralisme Agama Di Indonesia', *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya*, 2018
- Lestari, Diva Nadia, Nidaurohmah Nidaurohmah, and Isna Nur Septiana, 'SEJARAH DAN PERKEMBANGAN IKHWANUL MUSLIMIN DI MESIR', *JUTEQ: JURNAL TEOLOGI & TAFSIR*, 2.4 (2025), 833–51
- Machmudi, Yon, *Islamising Indonesian: The Rise of Jemaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party (PKS)* (ANU Press, 2008)
- Mawlana, Ahmad, and Fadi Zatari, 'The Role of Central Security Forces in Supporting Authoritarian Regimes in Egypt (1969-2011)', *Insight Turkey*, 27.1 (2025), 217–34
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow, and Charles Tilly, 'Dynamics of Contention Cambridge, UK: Cambridge Univ' (Press, 2001)
- Šišić, Hrustan, 'A Strategic Partnership between the USA and Egypt: A Historical Overview', *MAP Social Sciences*, 5 (2025), 55–67
- Tadros, Mariz, *The Muslim Brotherhood in Contemporary Egypt: Democracy Redefined or Confined?* (Routledge, 2012)
- Umar, Ahmad Rizky M, *Dakwah Dan Kuasa* (Basabasi, 2020)
- Wickham, Carrie Rosefsky, 'The Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamist Movement-Updated Edition', 2015
- Yahya, Shamsul Azhar, 'Politik Dan Dakwah Dalam Perjuangan Ikhwan Al Muslimin Di Mesir, 1970-1981' (University of Malaya (Malaysia), 2017)
- ZUHRI, MOHALIHS, 'ANALISIS PELANGGARAN HUMAN SECURITY PEMERINTAH MESIR TERHADAP IKHWANUL MUSLIMIN PERIODE

Hilmi Muhammadiyah & Mukodas Arif Subekti

GAMAL ABDUL NASER & ANWAR SADAT (1954-1981)', UII, 2024